

DPRD Setujui Dua Raperda Baru



DPRD Kota Depok menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok. Kedua raperda itu adalah raperda penyertaan modal melalui penambahan kepemilikan modal saham Pemerintah Kota Depok pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kemudian raperda tentang penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok, untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui rapat paripurna di Gedung DPRD pada Selasa, 26 April 2016.

Ketua Pansus II, Mohamad HB menjelaskan, penambahan modal PDAM Tirta Asasta Kota Depok itu dilakukan agar tahun 2019, 80 persen masyarakat Depok terlayani air bersih. Saat ini masyarakat Depok yang terlayani air bersih baru

13 persen. Jumlah pelanggan PDAM saat ini 55.000 pelanggan.

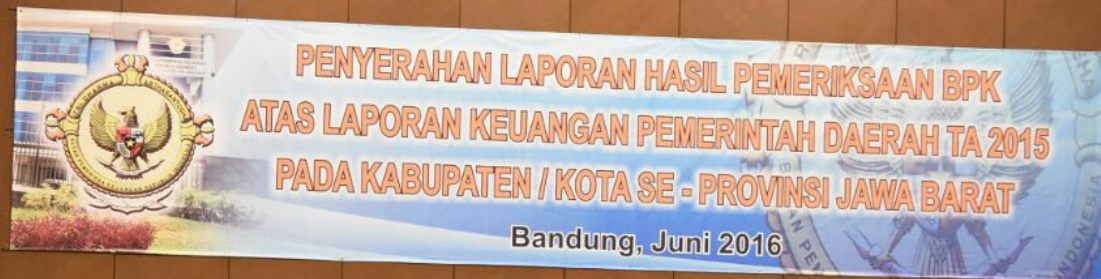
Oleh karena itu dibutuhkan Rp 1,2 triliun untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih. Sesuai dengan raperda tersebut maka Pemkot Depok melakukan penambahan penyertaan modal Rp 499 miliar. Dana tersebut diberikan bertahap selama lima tahun. Pada APBD Perubahan 2016 sekitar Rp 125 miliar, APBD 2017 Rp 100 miliar, APBD 2018 Rp 100 miliar, APBD 2019 Rp 100 miliar dan sisanya di APBD 2020.

Untuk menutupi kekurangan penambahan modal itu maka direkomendasikan mendapatkan sumber keuangan dari APBN.

"Penyertaan modal jangan bersumber dari bank (pinjaman). Apalagi pihak ke 3 (swasta). Sebab mengingat kebutuhan air bersih adalah kebutuhan dasar dan menjadi urusan wajib pemerintah yang diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah," katanya.

Menurut Mohamad HB, pada tahun 2020 diharapkan pelanggan PDAM meningkat 100.000 pelanggan di Depok, sehingga total pelanggan mencapai 155.000 pelanggan atau sebanyak 35 persen masyarakat Depok terlayani air bersih.

Sementara itu, untuk raperda penyertaan modal melalui penambahan kepemilikan modal saham Pemerintah Kota Depok pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dimaksudkan Pemkot Depok dapat membeli saham Bank BJB Banten. Dana pembelian saham itu diperoleh dari deviden 37 persen keuntungan dari modal di BJB Banten atau senilai Rp 7,2 miliar. Dana sebesar Rp 7,2 miliar itu dapat membeli 1 juta saham di BJB Banten. Dana yang dialokasikan untuk pembelian saham BJB Banten per lembaranya Rp 940 itu sebesar Rp 10 miliar.



HASIL KERJASAMA SELURUH PIHAK, DEPOK TERIMA PENGHARGAAN WTP KALI KELIMA

Memasuki tahun 2015 yang lalu, seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) se-Indonesia mulai menerapkan laporan Keuangan Daerah, dengan sistem Akuntansi Berbasis Akrual. Dalam sistem ini berlaku baik pada sistem akuntansinya maupun pada penyajian laporan keuangan yang dibuat.

Kota Depok menjadi salah satu Kota di Jawa Barat yang telah menerapkan sistem tersebut. Hal ini menyebabkan Kota Depok diganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemberian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

"WTP yang diraih 5 kali berturut-turut dari tahun 2011 sampai tahun 2015 merupakan hasil kerjasama yang baik dari seluruh pihak termasuk masyarakat Kota Depok," ungkap Walikota Depok, Mohammad Idris, di Bandung, Selasa (7/6/2016).

Dalam kesempatan yang baik tersebut, Walikota Depok menerima 3 buku LHP yang

diberikan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa. Adapun ketiga buku tersebut antara lain, Buku 1. tentang laporan keuangan Pemda, Buku 2. tentang Pemeriksaan terhadap pengendalian intern, serta Buku 3. tentang Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan.

Sementara itu, Arman Syifa menjelaskan bahwa ada beberapa manfaat dalam penerapan Akuntansi Berbasis Akrual. Diantaranya, dapat memberikan gambaran utuh atas posisi keuangan Pemda, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hal dan kewajiban Pemda, dan memberikan informasi yang lebih berkualitas dalam evaluasi kinerja Pemda.

"Kami menyadari masih banyak kendala Pemda dalam penerapan dan penyusunan keuangan daerahnya. Untuk itu, kami sangat mengapresiasi Pemda yang telah mendapat opini WTP hari ini. Sedangkan untuk Pemda yang belum mendapat WTP dan masih diberikan beberapa catatan khusus, hendaknya kedepan bisa lebih baik lagi dalam penyusunan laporan keuangan Pemdanya," tutupnya seraya berpesan.